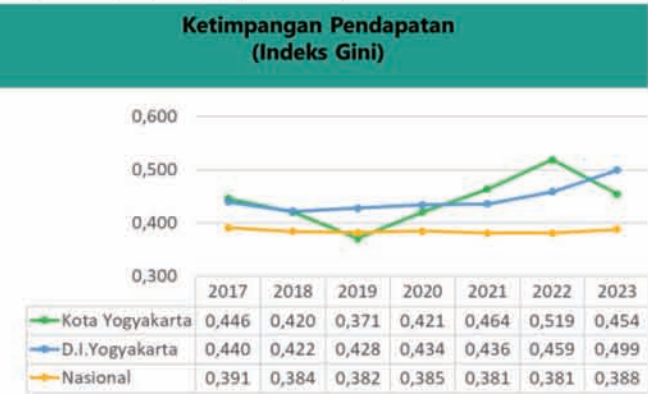


6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah Indeks Gini yang menjadi tujuan Pembangunan Kota Yogyakarta yang melingkupi sasaran pertumbuhan ekonomi.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2023

Indikator	2022	Target Kota Yk 2023	Target Kota Yk 2024
Gini Ratio	0,519	0,393-0,500	0,389-0,490

Sumber: BPS Kota Yogyakarta dan Analitis Bappada, 2024

0.454

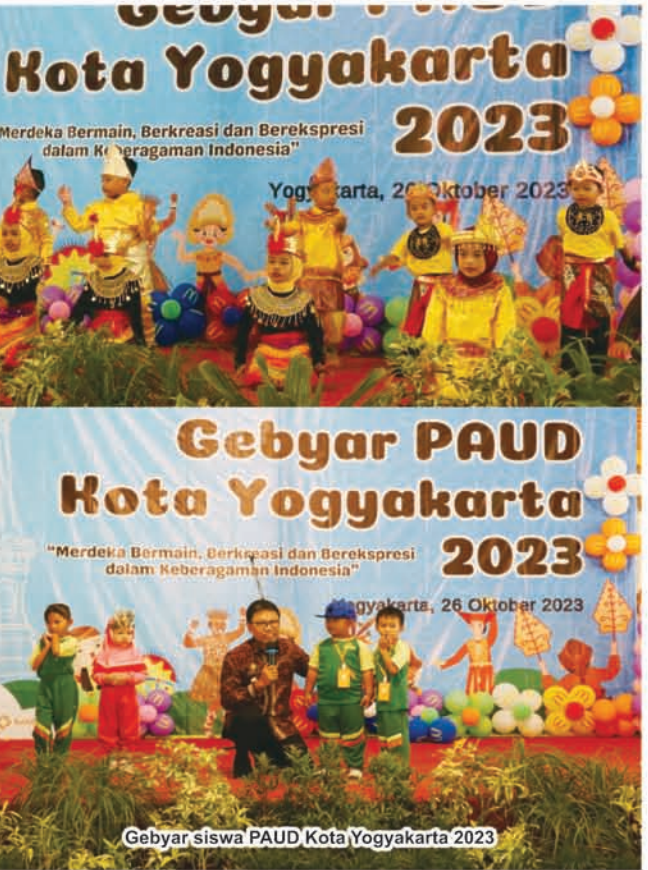
Indeks Gini Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2019-2022 mengalami trend kenaikan. Hal ini menunjukan bahwa kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat cukup tinggi. Kemudian pada tahun 2023 gini rasio Kota Yogyakarta mengalami penurunan di angka 0,454. Hal tersebut terkonfirmasi pada laporan distribusi pengeluaran penduduk DIY (per Maret 2022) yang rilis di Bulan Juli 2023 bahwa peningkatan ekonomi masyarakat desil 1-4 perkotaan dalam proporsi pengeluaran meningkat dari 14,87% (Maret 2021) menjadi 15,53% (Maret 2022). Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat desil 1-4 diharapkan mampu memperkecil ketimpangan yang diukur dengan indeks gini. Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk peningkatan pendapatan kelompok 40% penduduk pendapatan terendah. Pada sisi teknologi informasi dimana juga menjadi salah satu sektor andalan pada perekonomian Kota Yogyakarta, perluasan akses digital kepada kelompok tersebut dan juga peningkatan literasi digital dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan.

IV. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DASAR

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 SPM terdiri atas 6 (enam) urusan yaitu: Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Trantibumlinmas, dan Urusan Sosial. Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan SPM dan dilaporkan dalam Sistem Aplikasi SPM sampai dengan triwulan 4 sebagai berikut:

a. Urusan Pendidikan

Sasaran SPM urusan pendidikan terdiri atas pendidikan dasar usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Pelaksanaan SPM bidang pendidikan tahun 2023 triwulan 4 dengan status pada aplikasi SPM Tuntas Paripurna 100%.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2023

b. Urusan Kesehatan

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Pelaksanaan SPM urusan kesehatan tahun 2023 triwulan 4 dengan status pada aplikasi SPM Tuntas Paripurna 100%.

c. Urusan Pekerjaan Umum

Sasaran SPM urusan pekerjaan umum terdiri atas penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Pelaksanaan SPM bidang pekerjaan umum tahun 2023 triwulan 4 dengan status pada aplikasi SPM Tuntas Paripurna 100%.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta, 2023



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta, 2023

d. Urusan Perumahan Rakyat

Sasaran SPM urusan perumahan rakyat terdiri atas, penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat tahun 2023 triwulan 4 dengan status pada aplikasi SPM Tuntas Paripurna 100%.

e. Urusan Trantibumlinmas

SPM urusan Trantibumlinmas dibagi menjadi 3 (tiga sub urusan) yaitu sub urusan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum), sub urusan kebencanaan, dan sub urusan kebakaran. SPM sub urusan trantibumlinmas terdiri atas, pelayanan ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan sasaran SPM sub urusan kebencanaan terdiri atas 3 sasaran yaitu, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Kemudian sasaran SPM sub urusan kebakaran yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Pelaksanaan SPM urusan trantibumlinmas tahun 2023 triwulan 4 dengan status pada aplikasi SPM Tuntas Paripurna 100%.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, dan BPBD Kota Yogyakarta, 2023

f. Bidang Sosial

Jenis pelayanan dasar urusan sosial terdiri atas:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
 2. Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar diluar panti;
 3. Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
 4. Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut gelandangan dan pengemis diluar panti;
 5. Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial.
- Pelaksanaan SPM sosial sosial tahun 2023 triwulan 4 dengan status pada aplikasi SPM Tuntas Paripurna 100%.



Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

Secara umum capaian SPM 6 (enam) Urusan Tahun 2023 di Kota Yogyakarta sebagai telah mencapai 100%. Pemerintah Kota Yogyakarta terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pemberian layanan dasar salah satunya melalui optimalisasi pelaksanaan 4 (empat) tahapan penerapan SPM.

V. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Pada pelaksanaan evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan Skor 3,2920 dengan Status Kinerja Sedang Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022. Skor tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,93 dibandingkan dengan skor evaluasi tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021.



Terkait indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan provinsi DIY. Hal ini menandakan Pemkot Yogyakarta telah mendapatkan predikat opini WTP untuk yang ke-15 kali berturut-turut, dan terbanyak di DIY. Prestasi tersebut diraih setelah LKPD Yogyakarta tahun anggaran 2023 diserahkan oleh Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit kepada Penjabat Wali Kota Yogyakarta. Selain itu Pemkot Yogyakarta juga menjadi Pemerintah Daerah pertama di Indonesia yang menyerahkan unaudited LKPD TA 2023 kepada BPK RI pada 12 Januari 2024.



VI. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berikut adalah penjabaran realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.891.691.059.144,00	1.999.249.357.686,53	105,69
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	695.268.581.456,00	803.673.277.479,53	115,59
PENDAPATAN TRANSFER	1.196.393.777.688,00	1.195.547.380.207,00	99,93
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.700.000,00	28.700.000,00	100,00
BELANJA DAERAH	2.138.486.539.000,00	1.972.548.991.208,16	92,24
BELANJA OPERASI	1.822.289.419.050,00	1.716.772.351.315,00	94,21
BELANJA MODAL	282.856.186.951,00	251.882.371.033,04	89,05
BELANJA TIDAK TERDUGA	32.507.624.219,00	3.060.960.000,12	9,42
BELANJA TRANSFER	833.308.860,00	833.308.860,00	100,00
PEMBIAYAAN DAERAH	246.795.479.936,00	246.798.479.935,93	100,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	301.462.479.936,00	301.465.479.935,93	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	54.667.000.000,00	54.667.000.000,00	100,00

VII. INOVASI DAERAH

Penjabat Wali Kota Yogyakarta berkomitmen melanjutkan pelaksanaan dan pengembangan inovasi daerah yang telah diterapkan pada masa jabatan Kepala Daerah periode yang lalu, serta mendorong penumbuhan, pengembangan dan replikasi inovasi.

Data pada aplikasi Intivada yang dapat diakses melalui JSS, terdapat 43 inovasi yang diusulkan pada tahun 2023. Ditambah dengan data yang terdapat dalam Dokumen LAKIP OPD, Buku Profil Pembangunan, serta Sistem IGA Kemendagri, total terdapat 129 inovasi yang akan dibuat dan diperbarui pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 50 inovasi dibahas dalam Diklat Inisiasi Inovasi Daerah.

Menurut PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, bentuk Inovasi Daerah terdiri dari 3 yaitu Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dari tahun 2017 Hingga Tahun 2022, Kota Yogyakarta telah menginisiasi lebih dari 200 inovasi dan jumlah ini terus bertambah.

Pada tahun 2023 Kota Yogyakarta melaporkan sebanyak 209 inovasi kepada Kementerian Dalam Negeri melalui sistem Innovative Government Award (IGA), namun hanya 45 inovasi yang dikirim untuk dinilai. Inovasi tersebut merupakan hasil penerapan pada tahun 2021 dan 2022.

Berdasarkan bentuk inovasi, terbagi menjadi:

- Inovasi pelayanan publik, berjumlah 114 inovasi (54,54%)
- Inovasi tata kelola pemerintahan, berjumlah 67 inovasi (32,05%)
- Inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, berjumlah 28 inovasi (13,41%)

Sedangkan berdasarkan Inisiator, terbagi menjadi:

- Inisiasi Kepala Daerah, sejumlah 12 inovasi (5,7%)
- Inisiasi OPD, sejumlah 116 inovasi (55,5%)
- Inisiasi ASN, sejumlah 73 inovasi (34,9%)
- Inisiasi masyarakat, sejumlah 8 inovasi (3,8%)

Kementerian Dalam Negeri mendorong adanya inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar dengan mewajibkan pelaporan minimal 2 inovasi pada minimal 2 urusan wajib pelayanan dasar. Jumlah inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar yang diterapkan pada tahun 2020 dan 2021 adalah:

- Urusan pendidikan, berjumlah 1 (10%)
- Urusan kesehatan, berjumlah 2 (20%)
- Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, berjumlah 5 (50%)
- Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, berjumlah 0 (0%)
- Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, berjumlah 0 (0%)
- Urusan sosial, berjumlah 2 (20%).

Pada Oktober 2023 juga telah me-launching Pojok IP (Intellectual Property) Agency HKI di PDIN di mana masyarakat dapat berkonsultasi terkait HKI, Masyarakat dapat memanfaatkan pojok HKI di PDIN untuk mencari tahu alternatif terbaik dari pemanfaatan ekonomi kekayaan intelektual yang sudah dan akan dimiliki, pada Layanan Pojok Kekayaan Intelektual atau IP agency HKI itu adalah satu wujud dari program Strategi Kolaborasi Pengelolaan HKI IKM melalui agregasi konsiliasi fasilitasi PDIN (Satria Harsa PDIN).



Pada tahun 2023, Kota Yogyakarta memperoleh Penghargaan IGA 2023 kategori Kota Sangat Inovatif yang diterima oleh Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo di Jakarta pada Hari Selasa (12/12/2023). Dalam penilaian IGA 2023, Pemkot Yogyakarta dalam IGA 2023 mendapatkan skor Indeks Inovasi Daerah 62,78 sehingga masuk kategori sangat inovatif.



VIII. PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2023 telah kami sampaikan. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap stakeholder dan seluruh warga Kota Yogyakarta atas segala masukan, saran, dukungan dan kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Yogyakarta. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan, kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta.

Wabillahitaufiq Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

